

**EKSISTENSI HAK ULAYAT (TANAH TONGKONAN)  
MASYARAKAT TANA TORAJA DI KECAMATAN  
RANTEPAO KABUPATEN TANA TORAJA**



**Tesis**

**Diajukan untuk memenuhi Sebagian persyaratan  
mencapai derajat Sarjana S-2**

**MAGISTER KENOTARIATAN**

**Disusun oleh :**

**Rahayu Sri Dewi, S.H.**

**B4B.001 245**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2003**

**TESIS**  
**EKSISTENSI HAK ULAYAT (TANAH TONGKONAN)**  
**MASYARAKAT TANA TORAJA DI KECAMATAN**  
**RANTEPAO KABUPATEN TANA TORAJA**

Disusun oleh :

**RAHAYU SRI DEWI, S.H**

**B 4B 001 245**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 0 / 7 / 2003

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

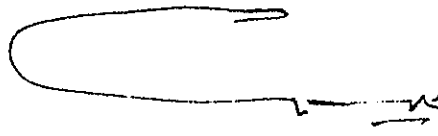
Menyetujui,  
Pembimbing Tesis



**Prof. I.G.N. Sugangga, S.H**

**NIP. 130 359 063**

Ketua Program Studi  
Magister Kenotariatan



**Prof. I.G.N. Sugangga, S.H.**

**NIP. 130 359 063**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- *Carilah ilmu yang terbaik untukmu meskipun harus menyebrangi lautan*
- *Jangan jadikan jarak sebagai rintangan untuk menimba ilmu*

Kupersembahkan kepada :

Ayahku :

Prof.Prayitno.K.

Ibuku : Dra. Ngudiarti

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “EKSISTENSI HAK ULAYAT (TANA TONGKONAN) MASYARAKAT TANA TORAJA DI KECAMATAN RANTEPAO KABUPATEN TANA TORAJA”.

Tesis ini dimaksudkan untuk melengkapi dan memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN pada Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam penulisan tesis ini penulis mendapat bantuan dan petunjuk serta saran-saran yang sangat berguna. Oleh karenanya, merupakan suatu ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan bagi penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. I.G.N. Sugangga, S.H., selaku Ketua Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
2. Bapak R. Suharto, S.H., M.Hum, selaku Sekertaris Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
3. Bapak H. Achmad Chulaimi, S.H., atas koreksinya.
4. Ibu Hj. Sri Sudaryatmi, S.H, atas koreksinya.
5. Bapak Sukirno, S.H., Ms.i, atas koreksinya
6. Bapak Machmud Rachimi, S.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Makale di Kabupaten Tana Toraja.
7. Bapak Calveyn Kadenganan, S.H., M.Hum, selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tana Toraja.

8. Bapak Ir. Yohannis Bataragoa, selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tana Toraja.
9. Bapak Yohanes Buntu Lobo, S.H., selaku Camat Rantepao
10. To Pareng Kecamatan Rantepao, selaku Kepala Adat.
11. Tokoh Masyarakat Kecamatan Rantepao.
12. Teman-teman terdekat angkatan 2001/2002 Program Magister Kenotariatan, yang telah membantu memberikan dorongan dan masukan secara langsung maupun tidak langsung.
13. Pihak-pihak lain yang tidak disebutkan satu persatu.
14. Kepada Ayah dan Ibu tercinta yang tidak jemu-jemunya mendorong saya untuk menyelesaikan Program Magister Kenotariatan.
15. Kepada Bapak Yaya Suahya, S.Sos yang selalu mendorong saya untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.

Semoga amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat pahala dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, maka dengan kerendahan hati, penulis mohon saran dan kritikan yang membangun serta dapat bermanfaat dan berguna bagi semuanya.

Rantepao, 2003

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR ISTILAH .....	viii
DATAR LAMPIRAN .....	ix
ABSTRACT .....	x
ABSTRAKSI .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Manfaat Penelitian .....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	10
2.1. Masyarakat Hukum Adat .....	10
2.2. Hak Ulayat .....	12
2.2.1. Konsepsi Hak Ulayat Menurut Hukum Adat .....	12
2.2.2. Konsepsi Hak Ulayat Menurut Undang-Undang Pokok Agraria .....	17
2.3. Subjek dan Objek Hak Ulayat serta Cara Terjadinya .....	20
2.4. Hubungan antara Hak Ulayat dengan Hak Individu .....	23
2.5. Kedudukan Hak Ulayat Setelah Berlakunya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat .....	27

BAB III METODE PENELITIAN.....	29
3.1. Metode Pendekatan Masalah.....	29
3.2. Lokasi Penelitian.....	29
3.3. Spesifikasi Penelitian.....	30
3.4. Populasi dan Sampling .....	30
3.5. Jenis Pengumpulan Data.....	30
3.6. Teknik Analisis Data .....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	32
4.1.1. Letak, Luas dan Batas Kecamatan Rantepao .....	32
4.1.2. Penduduk .....	33
4.1.3. Keadaan, Iklim dan Suhu .....	33
4.1.4. Keadaan Fisik Wilayah .....	34
4.1.5. Sumber Penghidupan .....	34
4.1.6. Lembaga Adat dan Struktur Organisasinya .....	35
4.2. Keberadaan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Tana Toraja di Kecamatan Rantepao Kabupaten Tana Toraja .....	39
4.3. Sistem Penguasaan Tanah/Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Tana Toraja di Kecamatan Rantepao Kabupaten Tana Toraja.....	44
4.4. Pelaksanaan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Tana Toraja di Kecamatan Rantepao Kabupaten Tana Toraja Setelah Berlakunya Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat ...	48
BAB V PENUTUP .....	51
5.1. Kesimpulan .....	51
5.2. Saran .....	52
DAFTAR PUSTAKA	

## DAFTAR ISTILAH

Tanah Tongkonan	=	Tanah Adat.
Pantane	=	Rumah Kubur.
Tana	=	Tanah.
Tana'	=	Strata sosial dalam masyarakat Tana Toraja.
Tokapua/Tana' Bulaan	=	Sebutan untuk kaum bangsawan.
Anak Patalo	=	Sebutan untuk kaum bangsawan.
Kayu Kalandona Tondok	=	Sebutan untuk kaum bangsawan.
Todi Bulle Ulunna	=	Sebutan untuk kaum bangsawan.
Tana' Bassi/Tomakaka	=	Sebutan untuk masyarakat golongan menengah pada masyarakat adat Tana Toraja.
Tomakaka Kandian	=	Sebutan untuk masyarakat golongan menengah pada masyarakat adat Tana Toraja.
Tana' Karurung	=	Sebutan untuk golongan masyarakat pekerja yang tidak memiliki tanah dan harta pada masyarakat adat Tana Toraja.
Tana' Kua-Kua	=	Sebutan untuk golongan budak pada masyarakat adat Tana Toraja.
Ambe' Tondok	=	Sebutan bagi pemimpin masyarakat kolektif dalam sebuah desa.
Toparengé'	=	Sebutan bagi penanggung jawab adat dan agama.
Tobara	=	Sebutan bagi orang yang membantu Toparengé dalam membina adat pada sebuah desa.
Aluk Todolo	=	Kepercayaan Animis pada masyarakat adat Tana Toraja.
Puya	=	Akhirat/tempat peristirahatan setelah meninggal dunia.
Tedong Bonga	=	Kerbau belang.
Rumah Tongkonan	=	Rumah adat.
Liang	=	Tempat pekuburan orang Toraja yang terletak di lereng bukit yang terjal.



## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Surat Ijin Penelitian
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Telah Meneliti.
- Lampiran 3 : Putusan Pengadilan
- Lampiran 4 : Putusan Pengadilan

## ABSTRAKSI

Kabupaten Tana Toraja terletak 340 km dari Makassar, Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan Kecamatan Rantepao terletak  $\pm$  18 km dari Makale, Ibukota Kabupaten Tana Toraja.

Seperti pada negara-negara yang berlatar belakang agraris, masalah tanah, penguasaan dan kepemilikannya merupakan sumber penghidupan masyarakat, sehingga penguasaan dan pemilikan tanah seringkali tampil sebagai permasalahan yang kompleks, peka dan sensitif. Oleh sebab itu fenomena permasalahan tentang tanah pada masyarakat akan semakin kompleks dan tajam seiring dengan perkembangan masyarakat serta tuntutan kehidupan.

Sumber data dan penelitian ini adalah data sekunder dan primer. Data sekunder diperoleh melalui literatur berupa dokumen, buku-buku, Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999. Sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara yang terdiri dari unsur Kantor Pertanahan, Kantor Kehutanan, para pemuka adat dan tokoh masyarakat.

Data dikumpulkan dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara dan studi dokumentasi selanjutnya diuraikan dengan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa keberadaan hak Ulayat di Kecamatan Rantepao masih ada namun keberadaannya semakin kurang disebabkan sistem penguasaannya dilakukan oleh keluarga masing-masing pemilik tanah dan baru melibatkan pemimpin adat bila terjadi sengketa.

## ABSTRACT

Tana Toraja is a district which is located 340 km away from Makassar, the capital province of South Sulawesi. While Rantepao, the subdistrict, is 18 km away from Makale, the capital district of Tana Toraja. The objectives of the research are to find and to describe :

- (1) How is the existence of Ulayat Rights, Tana Toraja's customary law society in Rantepao, Tana Toraja ?
- (2) How is the authorization system of Ulayat Land, Tana Toraja's customary law society in Rantepao, Tana Toraja ?
- (3) How the application of Ulayat Rights, Tana Toraja's customary law society due to regulation No. 5 /1999 issued by the Development Appeal Ministry for Development Appeal Board.

About the problem solving guidance of Ulayat Rights, customary law society.

This is a survey research. The primary data sources is based on the key information from the Land Affair office, forestry office, customary leaders, and the prominent society.

Data is collected using instruments of interviewed and documentation study, then it is explained in qualitative descriptive analysis.

The result of the research showed that the existence of Ulayat Rights in Rantepao is still exist but the existence has gradually decreased which is caused by the authorization system done by each member of the land lord's family. The customary leaders will get involve when problem occurred.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pada negara-negara yang berlatar belakang agraris, masalah tanah, penguasaan dan kepemilikannya merupakan sumber penghidupan dan ketergantungan masyarakat, sehingga tidak mengherankan jika penguasaan dan pemilikan tanah senantiasa tampil sebagai permasalahan yang kompleks, peka dan sensitif, oleh sebab itu sebelum manusia menemukan suatu sumber penghidupan selain tanah, maka fenomena permasalahan tentang tanah pada masyarakat akan semakin kompleks dan tajam seiring dengan perkembangan masyarakat serta tuntutan kehidupan.

Tanah mempunyai arti yang sangat penting bagi hidup dan kehidupan manusia, dan keduanya (tanah dan manusia) merupakan dua substansi yang tidak dapat dipisahkan. Tanah adalah tempat berpijak dan memperoleh sumber penghidupan dengan mengeksploitasinya, bahkan sampai matipun masih akan tetap membutuhkan tanah untuk tempat pemakamannya. Dengan demikian masalah tanah bukanlah hal yang baru, tetapi merupakan masalah sejak manusia berada di permukaan bumi ini.

Dewasa ini dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah untuk keperluan hidup (termasuk untuk pembangunan), sementara tanah negara dapat dikatakan nyaris sudah tidak tersedia lagi maka issue tentang keberadaan tanah hak ulayat sangat perlu mendapat kepastian hukum.

Pada mulanya hak ulayat ini timbul karena adanya masyarakat hukum adat yang menguasai tanah secara terus-menerus dengan mengatur para anggota masyarakatnya dalam memanfaatkan tanah tersebut.

Ada dua pandangan atau sikap mengenai issue tersebut, jika di satu pihak terdapat kekhawatiran bahwa hak ulayat yang semula sudah tidak ada, kemudian dinyatakan hidup lagi, sementara di pihak lain, ada kekhawatiran bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah, akan semakin mendesak pula hak ulayat yang keberadaannya dijamin oleh pasal 3 UUPA.

Pengakuan mengenai hak ulayat ditegaskan dalam pasal 3 UUPA

dengan menyebutkan "dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi".<sup>1)</sup>

Bertambahnya penduduk dan adanya kecenderungan berkurangnya tanah untuk digarap akan menimbulkan permasalahan-permasalahan di bidang sosial-ekonomi dan sosial-politik.

Berhadapan dengan lembaga hak atas tanah yang dikenal dengan sebutan hak ulayat ini, banyak pihak yang merasa prihatin sebab hal tersebut bila disimpulkan secara cepat, maka hak ulayat yang dihadapi itu dianggap sudah tidak ada lagi, apalagi dengan dalih terselubung adanya kepentingan lain yang lebih besar dan mendesak, maka tindakan itu jelas bertentangan

---

<sup>1)</sup> Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960

dengan prinsip pengakuan terhadap hak ulayat oleh UUPA yang dijabarkan dalam pasal 3.

Sebaliknya, dengan itikad baik dan kesadaran penuh untuk menghormati hak-hak masyarakat hukum adat terhadap tanah yang merupakan sumber kehidupan simbolis dalam menata kehidupan olehnya itu kenyataan hak ulayat sudah tidak dapat diingkari keberadaannya.

Hal ini disebabkan karena pasal 3 UUPA yang memberikan dasar bagi pengakuan hak ulayat dengan menyebut dua persyaratan, yakni persyaratan mengenai keberadaan/eksistensinya dan pelaksanaannya, tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang kriteria penentu eksistensi hak ulayat itu sementara dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5. Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah hak ulayat masyarakat hukum adat pasal 2 ayat 2 dinyatakan bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila :

- a. Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari.
- b. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan

- c. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk mengetahui keberadaan hak ulayat dalam suatu wilayah harus memenuhi 3 unsur penting, yaitu :

1. Adanya masyarakat hukum adat (subyek hak ulayat)
2. Terdapat tanah ulayat (obyek hak ulayat)
3. Ada aturan hukum adat yang ditaati oleh masyarakat hukum adat.

Untuk mengelola tanah dalam wilayah masyarakat hukum adat tersebut termasuk menentukan hubungan yang berkenaan dengan persediaan, peruntukan, pemanfaatan dan pelestariannya ( aturan atau hukum yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat hukum adat dalam wilayah tersebut ).

Dengan demikian, secara formal tidak sulit untuk memahami hal itu, namun masalahnya akan menjadi tidak sederhana jika harus berhadapan dengan peristiwa hukum yang konkrit. Kesulitan utama adalah menghilangkan kebiasaan dalam menerapkan aturan-aturan yang bersifat formal dengan pendekatan legalistik semata. Karena dengan pendekatan ini dapat berakibat pengingkaran terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) yang bersangkutan.

Karena itu, perlu adanya kesadaran bahwa berhadapan dengan hak ulayat, berarti harus membuka diri untuk memahami kesadaran hukum suatu

masyarakat yang terwujud dalam tindakan nyata sehari-hari berangkat dari sudut pandang dan pola pikir masyarakat yang bersangkutan.

Pemahaman yang utuh terhadap keberadaan hak ulayat masyarakat dan pemahaman tentang struktur kemasyarakatan, termasuk pola-pola kekuasaan dalam masyarakat hukum itu, yang akan memberikan kejelasan tentang "siapa" (tokoh yang diberi kepercayaan masyarakat tersebut) yang berwenang menentukan "hal-hal apa" (hubungan hukum dan perbuatan hukum berkenaan dengan tanah wilayahnya), dan dalam "forum apa" keputusan tentang pelaksanaan berwenang itu dilakukan. Dengan demikian dapat dihindarkan kesalahan untuk berurusan dengan pihak yang tidak berkompeten memutuskan sesuatu.

Dalam kaitan dengan penentuan tanah wilayah masyarakat sebagai obyek hak ulayat, tidak selalu mudah dilakukan, karena batas-batas wilayah sering berupa batas alam. Namun, kiranya para penguasa/tetua adat sebagai saksi hidup dari masyarakat hukum adat tersebut pada umumnya dapat menunjukkan batas wilayahnya apabila diminta.

Dalam pelaksanaannya, seperti juga hak atas tanah lainnya, hak ulayat pun mengenal adanya fungsi sosial. Artinya, bila untuk kepentingan umum ataupun kepentingan lain yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka hak ulayat itupun dapat diberikan kepada pihak lain.

Masalahnya adalah perlunya pihak lain mengakui dan menghormati hak itu dan permohonan untuk memanfaatkannya dilakukan sesuai



ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini dilakukan dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat hukum yang bersangkutan dan mengindahkan tata cara yang hidup dalam masyarakat tersebut. Selain itu juga memberikan ganti kerugian dalam wujud yang bermanfaat bagi masyarakat hukum yang bersangkutan, yang dengan pengorbanannya berupa pemberian tanah wilayahnya tersebut berhak atas peningkatan taraf hidupnya sebagaimana dijamin pasal 27 UUD 1945.

Kesamaan pemahaman dari berbagai instansi yang sering berurusan dengan masalah tanah ulayat sangat diperlukan. Dengan demikian akan terwujud kesamaan perlakuan terhadap hak ulayat yang menjamin kepastian hukum serta bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

Keberadaan tanah ulayat (tanah tongkonan) bagi masyarakat adat Tana Toraja, khususnya pada kecamatan Rantepao di kabupaten Tana Toraja. Acapkali menjadi sumber sengketa seperti yang terjadi pada kasus perebutan tanah tongkonan antara Singkang Paratuar (1), L. Pidi (2), Bokko (3), Hendrik Mengkulle (4), Silono' (5), Seppa (6), L. Buntu (7), Katumbo (8), Sianto (9), L. Simanan (10), Ne' Merapai (11) dalam hal ini adalah ahli waris dari almarhum Luppio dan L. Pete sebagai Penggugat melawan karambe sebagai tergugat. Sengketa terjadi karena tindakan Karambe mempergunakan tanah tongkonan untuk membangun lumbung padi dan rumah kuburan yang disebut Patane. Singkang Paratuar dan ahli waris dari almarhum Luppio dan L. Pete lainnya menganggap bahwa Karambe bukan anak cucu dari keturunan Luppio dan L. Pete sehingga tidak berhak

mempergunakan atau mengambil manfaat diatas tanah tersebut. Contoh lain yaitu kasus perebutan tanah antara Bangnga (1), Andarias Basiang (2), Rimba (3), Dalle (4), Batan (5), So'Sau' (6), Ba'ka' (7), dan Lai' Salea (8) sebagai Penggugat melawan Lai' Sesa, dan B. Barung sebagai Tergugat. Pokok masalahnya karena Penggugat hendak menggali lubang untuk ditanami cengkeh dimana tanah tersebut adalah Tanah Tongkonan Kandianputu' (tanah adat dari Penggugat). Sebelum membuat lubang Penggugat telah menyampaikan maksud tersebut kepada Tergugat 1 (Lai' Sesa) akan tetapi pada saat Penggugat menggali lubang, secara tiba-tiba Tergugat 2 (B. Barung) melaporkan Penggugat kepada pemerintah setempat sebagai penyerobotan tanah. Padahal Tergugat bukanlah keturunan dari Tongkonan Kandianputu', mereka berasal dari kampung Rorre/Sarira yang datang ke kampung Kanan, sedangkan tanah yang mereka kelola hanya dipinjamkan sementara dengan syarat bahwa apabila ada keturunan dari Tongkonan Kandianputu' yang akan mempergunakan tanah tersebut maka mereka harus meninggalkan dan menyerahkan kepada pemiliknya (keturunan dari Tongkonan Kandianputu').

Bertolak dari hal tersebut di atas, maka penulis termotivasi untuk mengangkat masalah ini sebagai isu sentral, dengan dasar pemikiran bahwa jika hal tersebut tidak segera ditangani secara profesional, maka tidak tertutup kemungkinan akan menjadi masalah yang sangat kompleks.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok sebagai kerangka dasar dalam penelitian yaitu :

- 1.2.1. Bagaimana keberadaan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Tana Toraja di Kecamatan Rantepao, Kabupaten Tana Toraja.
- 1.2.2. Bagaimana sistem penguasaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Tana Toraja di Kecamatan Rantepao Kabupaten Tana Toraja.
- 1.2.3. Bagaimana pelaksanaan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Tana Toraja di Kecamatan Rantepao, Kabupaten Tana Toraja setelah berlakunya Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini secara garis besar bertujuan untuk :

- 1.3.1. Mengetahui Keberadaan hak ulayat pada masyarakat Hukum Adat Tana Toraja di Kecamatan Rantepao, Kabupaten Tana Toraja.
- 1.3.2. Mengetahui sistem penguasaan tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat Tana Toraja di Kecamatan Rantepao Kabupaten Tana Toraja.
- 1.3.3. Mengetahui pelaksanaan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat Tana Toraja di Kecamatan Rantepao, Kabupaten Tana Toraja setelah berlakunya Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor: 5 tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk :

- 1.4.1. Menjadi bahan masukan dan acuan pemikiran bagi pemerintah daerah dan semua pihak terkait yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pertanahan, terutama dalam menyikapi masalah-masalah yang muncul sehubungan dengan hak ulayat masyarakat adat.
- 1.4.2. Menjadi sumbangsih teoritis bagi pengembangan ilmu hukum khususnya menyangkut hukum pertanahan.
- 1.4.3. Menjadi referensi bagi peneliti berikutnya yang ingin meneliti lebih jauh hal-hal yang belum terungkap dalam penelitian ini, atau tentang masalah yang sama tapi ruang lingkup yang lebih luas lagi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Masyarakat Hukum Adat**

Menurut R. Supomo dalam bukunya yang berjudul Bab-bab tentang hukum adat dikatakan :

“Hukum adat adalah hukum non statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam (agama)”. Hukum adat itupun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan hakim, yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, di mana ia memutuskan perkara. Hukum adat berurat-berakar pada kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat.

Sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.<sup>2)</sup>

Sedangkan pengertian masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu

---

<sup>2)</sup> Dikutip I.G.N. Sugangga, Hukum Adat Khusus, Hukum Adat Waris pada Masyarakat Hukum Adat yang Bersistem Patrilineal di Indonesia. Semarang, 1998, hal 12-13.

persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.<sup>3)</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ciri pokok dari masyarakat hukum adat yaitu adanya kelompok manusia yang mempunyai batas wilayah tertentu dan kewenangan tertentu serta memiliki norma-norma atau aturan-aturan yang dipenuhi oleh kelompok manusia dalam wilayah tersebut.

Selanjutnya Ter Haar mengatakan bahwa masyarakat Hukum terdiri dari faktor teritorial (daerah) dan genealogis (keturunan).<sup>4)</sup>

Masyarakat hukum adat teritorial adalah masyarakat hukum berdasar lingkungan daerah, keanggotaan persekutuan seseorang tergantung pada tempat tinggalnya, apakah di dalam lingkungan daerah persekutuan atau tidak.

Sedangkan masyarakat hukum berdasarkan genealogik adalah persekutuan masyarakat hukum berdasarkan suatu keturunan (keluarga). Keanggotaan persekutuan seseorang bergantung pada apakah seseorang itu masuk dalam satu keturunan yang sama atau tidak.

Terdapat 3 jenis sistem kekeluargaan yang ada dalam masyarakat hukum adat Indonesia :

- a. Sistem Patrilineal, yaitu suatu masyarakat hukum di mana anggota-anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui bapak, bapak dari

---

<sup>3)</sup> Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia. Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Pasal 1, Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 ayat 3. Jakarta. Djambatan. 2000.

<sup>4)</sup> Ter Haar, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, 1979, Hal 8.

bapak terus ke atas sehingga dijumpai seorang laki-laki sebagai moyangnya.

- b. Sistem matrilineal, yaitu suatu sistem di mana masyarakat tersebut menarik garis keturunan ke atas melalui ibu, ibu dari ibu, terus ke atas sehingga dijumpai seorang perempuan sebagai moyangnya.
- c. Sistem parental atau bilateral adalah masyarakat hukum, di mana para anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui garis bapak dan garis ibu, sehingga dijumpai seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai moyangnya.<sup>5)</sup>

Sementara itu Boedi Harsono mengemukakan, bahwa hak dan kewajiban hak ulayat masyarakat hukum adat mengandung 2 unsur, yaitu :

- a. Mengandung hak kepemilikan bersama atas tanah bersama para anggota atau warganya, yang termasuk bidang hukum perdata.
- b. Mengandung tugas kewajiban mengelola, mengatur dan memimpin penguasaan, pemeliharaan, peruntukan dan penggunaannya yang termasuk bidang hukum publik.<sup>6)</sup>

## **2.2. Hak Ulayat**

### **2.2.1. Konsepsi hak ulayat menurut hukum adat**

Dalam UUPA pasal 3 ditetapkan bahwa hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat masih tetap

<sup>5)</sup> I.G.N. Sugangga, op.cit., hal 17-18.

<sup>6)</sup> Boedi Harsono, 'Hukum Agraria Indonesia. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta, Djambatan. 1999 hal 182.

dapat dilaksanakan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan sepanjang hak ulayat itu dalam realitasnya masih ada.

Hak Masyarakat Hukum atas tanah ini disebut Hak Pertuanan atau Hak Ulayat dan dalam literatur hak ini oleh Van Vollenhoven disebut *Beschikkingsrecht*.<sup>7)</sup>

Pengertian terhadap istilah hak ulayat ini lebih lanjut ditegaskan oleh G. Kertasapoetra dan kawan-kawan, yang menyatakan bahwa "Hak ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum (desa, suku) untuk menjamin ketertiban pemanfaatan/pendayagunaan tanah.

Hak ulayat tersebut merupakan hak suatu persekutuan hukum (desa, suku) dimana para warga masyarakat (persekutuan hukum) tersebut mempunyai hak untuk menguasai tanah, sebidang tanah yang ada di sekitar lingkungannya dimana pelaksanaanya diatur oleh ketua persekutuan (Kepala suku/kepala desa) yang bersangkutan.<sup>8)</sup>

Istilah hak ulayat ini dalam kenyataannya berbeda-beda di berbagai daerah di Nusantara ini, sebagaimana ditegaskan oleh Ter Haar dalam bukunya *beginnelsen en Stelsel Van Het Adatrecht*.

"Tanah wilayah sebagai kepunyaan (pertuanan-Ambon). Sebagai tanah yang memberi makan (penyampeto-Kalimantan), sebagai daerah yang dibatasi (pewatasan-Kalimantan, wewengkon-

---

<sup>7)</sup> Bushar Muhammad, pokok-pokok Hukum Adat, Jakarta, Pradnya Paramita, 2000, hal 103

<sup>8)</sup> G. Kertasapoetra, R.G. Kartasapoetra, AG. Kartasapoetra, A Setiady, Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah. Jakarta: PT. Bina Aksara 1985, Hal 88.



Jawa, prabumian-Bali) atau sebagai tanah yang terlarang bagi orang lain (tatabuan-bolaang-mangondouw). Akhirnya dijumpai pula istilah payar (Bali), paer (Lombok) dan ulayat (Minangkabau).”<sup>9)</sup>

Sedangkan Boedi Harsono mengatakan bahwa :

“Hak ulayat merupakan seperangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, yang merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. Wewenang dan kewajiban tersebut ada yang termasuk bidang hukum perdata, yaitu yang berhubungan dengan hak bersama kepunyaan atas tanah tersebut. Ada juga yang termasuk hukum publik, berupa tugas kewenangan untuk mengelola, mengatur dan memimpin peruntukan, penggunaan dan pemeliharannya”.<sup>10)</sup>

Dengan demikian, hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, didefinisikan sebagai kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dan sumber daya alam (termasuk tana) dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara alamiah dan bathiniah turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Jadi, hak ulayat adalah sebutan yang dikenal dalam kepustakaan hukum adat, sedangkan di kalangan masyarakat hukum adat di berbagai daerah di kenal dengan nama yang berbeda-beda. Hak ulayat merupakan hak penguasaan yang

<sup>9)</sup> Boedi Harsono, *op.cit.*, hal 186.

<sup>10)</sup> *Ibid.*, hal 185.

tertinggi atas tanah dalam hukum adat, yang meliputi semua tanah yang termasuk dalam lingkungan wilayah suatu masyarakat hukum adat tertentu, yang merupakan tanah kepunyaan bersama para warganya.

Hak ulayat, mengandung dua unsur yaitu unsur hukum perdata dan unsur hukum publik. Unsur hukum perdata adalah sebagai hak kepunyaan bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan atas tanah ulayat, yang dipercayai berasal mula-mula sebagai peninggalan nenek moyang mereka dan merupakan karunia suatu kekuatan gaib, sebagai pendukung utama kehidupan dan penghidupan serta lingkungan hidup seluruh warga hukum adat itu.

Sedangkan unsur hukum publik, yaitu sebagai kewenangan untuk mengelola dan mengatur peruntukan, penggunaan dan penguasaan tanah tersebut, baik dalam hubungan internal dengan warganya sendiri maupun eksternal dengan orang-orang yang bukan warganya.

Tampak pada uraian di atas, bahwa konsepsi hak ulayat menurut hukum adat jelas tersimpul nilai-nilai komunalistik religius magis yang memberi peluang penguasaan tanah secara individual, serta hak-hak yang bersifat pribadi, yang sekaligus tersimpan nilai kebersamaan. Dikatakan bersifat komunalistik karena hak itu bersama anggota masyarakat hukum adat atas tanah

yang bersangkutan yang dalam kepustakaan hukum adat oleh Ter Haar disebut "*Hak ulayat*".

Bersifat magis religius bahwa ulayat tersebut merupakan tanah milik bersama, yang diyakini sebagai sesuatu yang memiliki sifat gaib dan merupakan peninggalan nenek moyang dan para leluhur kepada kelompok masyarakat adat itu sebagai unsur terpenting bagi kehidupan dan penghidupan mereka sepanjang masa dan sepanjang kehidupan itu berlangsung.

Menurut Sukanto, hubungan antara persekutuan hukum dengan tanahnya (ulayat) diliputi oleh suatu sifat yang disebut religio magis yang artinya para warga persekutuan hukum (masyarakat) yang bersangkutan alam pikirannya masih kuat dipengaruhi oleh serba roh, yang menciptakan gambaran bahwa segala sesuatu yang bersangkut paut dengan pemanfaatan atau pendayagunaan tanah harus dilakukan secara hati-hati. Karena adanya potensi-potensi gaib.<sup>11)</sup>

Dengan demikian hak ulayat adalah hak milik bersama persekutuan warga masyarakat yang mempunyai nilai kebersamaan yang bersifat magic religius serta sakral yang sudah ada sejak dahulu dan dikuasainya secara turun temurun yang oleh para ilmuwan disebutnya sebagai "*Proses Budaya Hukum*".

---

11) Dikutip G. Kartasapoetra, R.G. Kartasapoetra, SH, Ir. A.G. Kartasapoetra, Drs. A. Setiady, op. cit., Hal 89-90.

### **2.2.2. Konsepsi Hak Ulayat Menurut Undang-Undang Pokok Agraria**

Tanggal 17 Agustus 1945 merupakan momentum bersejarah bagi bangsa dan negara Indonesia, karena pada saat itu kita terlepas dari belenggu penjajahan dan kolonialisme. Pada kurun waktu tersebut terjadinya perubahan secara berangsur-angsur diberbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, baik politik, ekonomi, hukum, budaya dan sosial lainnya.

Perubahan tersebut sejalan dan seiring dengan lajunya pertumbuhan pembangunan, khususnya pembangunan pertanahan, maka tepatnya tanggal 24 September 1960 bangsa Indonesia berhasil menyusun suatu produk hukum yang kemudian diajukan kepada pemerintah untuk dibahas dan kemudian disahkan sebagai Undang-Undang yang kini dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Dengan dimulai berlakunya UUPA pada tanggal 24 September 1960 maka terjadinya suatu perubahan secara mendasar pada hukum agraria (pertanahan) di Indonesia.

Sifatnya mendasar atau fundamental, karena mencakup berbagai aspek, baik mengenai struktur perangkat hukumnya, mengenai konsepsi yang mendasarinya, maupun isinya, yang dinyatakan dalam bagian (2) "berpendapat" UUPA harus sesuai

dengan kepentingan rakyat Indonesia serta memenuhi pula keperluannya menurut permintaan zaman.<sup>12)</sup>

Sedangkan pada konsederen huruf (a) UUPA dinyatakan bahwa :

Perlu adanya hukum agraria nasional yang berdasarkan hukum adat tentang tanah yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Penegasan dan pengakuan hukum adat sebagai kerangka dasar pembentukan UUPA tercermin dalam pasal 3 dan 5 yang pada intinya dinyatakan bahwa :

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Sedangkan dalam pasal 5 dinyatakan bahwa :

Hukum agraria yang berlaku di atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan-peraturan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Dengan menyimak uraian pada kedua pasal di atas, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa dengan demikian UUPA

---

<sup>12)</sup> Boedi Harsono, op.cit., hal 1.

menciptakan hukum agraria nasional berdasarkan struktur hukum adat secara tunggal, yaitu hukum adat tentang tanah, sebagai hukum asli bangsa Indonesia.

Pengakuan hak ulayat sebagaimana dimaksud tercermin dalam pasal 3, maka hak ulayat yang diakui oleh UUPA adalah pengakuan mengenai keberadaan dan pelaksanaannya. aspek eksistensi atau keberadaannya menunjukkan bahwa hak ulayat mendapat tempat dan pengakuan sepanjang menurut kenyataan masih ada, sedangkan bagi daerah-daerah yang hal tersebut sudah tidak ada lagi sekiranya tidak akan dihidupkan kembali, serta daerah-daerah yang hak ulayatnya tidak pernah ada, tidak akan diberikan hak ulayat baru.

Pada aspek pelaksanaannya, maka implementasinya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional bangsa dan negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang tingkatannya lebih tinggi.

Dalam memori penjelasan dipertegas bahwa hubungan bangsa Indonesia dengan bumi, air dan ruang angkasa adalah semacam hubungan "Hak Ulayat" (*beschikkingsrecht*) yang diangkat pada tingkatan paling atas/tinggi yaitu pada tingkat mengenai seluruh wilayah negara.

Dalam konteks demikian, maka kepentingan sesuatu masyarakat, adat harus tunduk pada kepentingan umum, bangsa

dan negara yang lebih tinggi dan luas. Oleh sebab itu tidak dapat dibenarkan jika dalam suasana berbangsa dan bernegara sekarang ini ada suatu masyarakat hukum adat yang masih mempertahankan isi pelaksanaan hak ulayat secara mutlak.

Berdasarkan optik UUPA di atas, maka dapat diasumsikan bahwa konsepsi hak ulayat menurut UUPA adalah bersifat komunikalistik religius. Tanah merupakan hakekat bangsa Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepadanya. Namun pada aspek lain, tidak menutup kemungkinan bahwa dalam konsepsi ini diberikan kelonggaran kepada para warga untuk menguasai bagian-bagiannya secara individual, dengan hak-hak yang lebih bersifat pribadi.

### **2.3. Subyek dan Obyek Hak Ulayat serta Cara Terjadinya**

Menurut Boedi Harsono subyek hak ulayat adalah masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat terbagi menjadi 2:

1. Masyarakat hukum adat teritorial, disebabkan para warganya bertempat tinggal di wilayah yang sama seperti Nagari di Minangkabau.
2. Masyarakat hukum adat genealogik, disebabkan para warganya terikat oleh pertalian darah seperti suku dan kaum.

Selanjutnya Bushar Muhammad mengemukakan obyek hak Ulayat meliputi:

- a. Tanah (daratan)
- b. Air (perairan seperti misalnya : kali, danau, pantai beserta perairannya)

- c. Tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar (pohon buah-buahan, pohon untuk kayu pertukangan atau kayu bakar dan sebagainya)
- d. Binatang liar yang hidup bebas di dalam hutan<sup>13)</sup>

Hak ulayat mempunyai sifat berlaku keluar dan ke dalam, maka kewajiban yang pertama dan utama penguasa adat yang bersumber pada hak tersebut adalah memelihara kesejahteraan, kepentingan anggota masyarakat hukumnya, mencegah terjadinya perselisihan dalam penggunaan tanah dan jika terjadi sengketa ia wajib menyelesaikannya. Memperhatikan hal tersebut, maka pada prinsipnya penguasa adat tidak diperbolehkan mengasingkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian tanah wilayahnya kepada siapapun.

Penegasan di atas pada prinsipnya terkandung makna bahwa ada pengecualian, di mana anggota masyarakat hukum adat diberikan keleluasaan untuk membuka dan menggunakan tanah yang berada pada wilayah hukumnya. Agar tidak terjadi konflik antara warga maka perlu memberitahukan hal tersebut kepada penguasa adat yang tidak bersifat permintaan ijin membuka tanah. Keadaan inilah yang disebut dengan kekuatan berlaku ke dalam.

Sedangkan terhadap sifat berlaku keluar adalah bahwa hak ulayat dipertahankan dan dilaksanakan oleh penguasa adat dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan terhadap orang asing atau bukan anggota

---

<sup>13)</sup> Bushar Muhammad, *op.cit.*, hal 105



masyarakat yang bermaksud ingin mengambil hasil hutan atau membuka tanah dalam wilayah hak ulayat tersebut.

Sehubungan dengan apa yang dikemukakan di atas, tidak menutup kemungkinan pula bagi mereka (orang asing/luar) dapat diberikan ijin oleh penguasa adat dengan syarat bahwa ia wajib memberikan kepadanya barang sesuatu yang disebut pengisi adat.

Hak menggunakan tanah atau hak memungut hasil tanah hanya untuk satu panen saja, pada umumnya berlaku bagi orang luar bukan warga persekutuan yang sudah mendapat ijin untuk mengerjakan sebidang tanah, serta telah memenuhi syarat-syarat tertentu seperti membayar mesi (Jawa) atau uang pemasukan (Aceh). Dalam kenyataan hak memungut hasil ini dimiliki lebih lama dari pada satu panen saja tetapi secara adat masa itu harus dilihat sebagai suatu masa satu panen yang tersambung dengan masa atau panen berikutnya dan seterusnya.<sup>14)</sup>

Menurut Boedi Harsono hak ulayat sebagai hubungan hukum konkret pada asal mulanya diciptakan oleh nenek moyang atau sesuatu kekuatan gaib, pada waktu meninggalkan atau menanugerahkan tanah yang bersangkutan kepada orang-orang yang merupakan kelompok tertentu. Hak ulayat sebagai lembaga hukum sudah ada sebelumnya. Karena masyarakat hukum adat yang bersangkutan bukan satu-satunya yang mempunyai hak ulayat. Bagi sesuatu masyarakat hukum adat tertentu, hak ulayat bisa tercipta karena pemisahan dari masyarakat hukum adat induknya, menjadi

---

<sup>14)</sup> Ibid., hal 109

masyarakat hukum adat baru yang mandiri, dengan sebagian wilayah induknya sebagai tanah ulayatnya.<sup>15</sup>

#### **2.4. Hubungan antara Hak Ulayat dengan Hak Individu**

Mengenai kedudukan hak individual, seseorang dianggap sebagai warga sistem pergaulan hidup yang bernama masyarakat sehingga dia bukanlah merupakan individu yang bebas sepenuhnya di dalam tingkah lakunya, oleh karena dia terikat oleh batas-batas yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Dia hidup dengan pedoman utama untuk mencapai tujuan-tujuan masyarakat; jadi kehidupannya terutama diperuntukkan mencapai tujuan-tujuan masyarakat. Akan tetapi tujuan-tujuan tadi, yang pada hakekatnya merupakan himpunan kewajiban dirasakan oleh para warga masyarakat sebagai suatu hal yang sewajarnya dari kehidupan manusia. Dengan demikian maka manusia perorangan adalah suatu makhluk ke dalam mana masyarakat mengkhususkan diri. Akan tetapi hal ini bukanlah berarti bahwa individu dengan hak-haknya sama sekali tidak mempunyai tempat dan peranan. Bukanlah maksudnya untuk membebani individu dengan kewajiban-kewajiban belaka.

Hak-hak perseorangan yang merupakan himpunan daripada kewenangan-kewenangannya tetap diakui dalam masyarakat tradisional. Akan tetapi penggunaan serta pelaksanaannya tidaklah secara bebas menurut kehendak pemilik hak. Setiap penggunaan hak harus dibenarkan oleh fungsinya hak tersebut di dalam masyarakat yang bersangkutan, yakni

---

<sup>15)</sup> Boedi Harsono, op.cit., hal 272

fungsi sosial. Apabila hak-hak perseorangan tadi dipergunakan di luar batas-batas fungsi sosialnya, maka penggunaannya menjadi pelanggaran hak.

Bushar Muhammad mengemukakan bahwa hak perorangan atas tanah dibatasi oleh hak ulayat. Sebagai seorang warga persekutuan maka tiap individu mempunyai hak untuk :

- a. Mengumpulkan hasil-hasil hutan seperti rotan, kayu dan lain sebagainya,
- b. Memburu binatang liar yang hidup di wilayah kekuasaan persekutuan,
- c. Mengambil hasil dari pohon-pohon yang tumbuh liar,
- d. Membuka tanah dan kemudian mengerjakan tanah itu terus menerus,
- e. Mengusahakan untuk diurus selanjutnya suatu kolam ikan

Jika perhubungan perseorangan ini kemudian terputus sehingga hak perseorangan menjadi hilang, maka kembalilah hak persekutuan (hak ulayat) untuk menguasai tanah.<sup>16)</sup>

Teranglah bahwa hukum adat mengenal isi pengertian fungsi sosial dari hak-hak atas tanah. Para warga masyarakat diberi kemungkinan untuk membuka hutan, menguasai dan menghaki tanah bukan sekedar untuk dipunyai, melainkan dengan tujuan untuk diusahakan bagi pemenuhan kebutuhan mereka masing-masing. Hak atas tanah menurut hukum adat tidak hanya memberi wewenang, tetapi juga meletakkan kewajiban kepada yang empunya untuk mengusahakan tanah. Demikianlah sifat asli dari hak-hak perorangan atas tanah menurut konsepsi hukum adat.<sup>17)</sup>

---

<sup>16)</sup> Bushar Muhammad, *op.cit.*, hal 107

<sup>17)</sup> Boedi Harsono, *op.cit.*, hal 189.

Dengan demikian maka hak milik atas tanah misalnya, bukanlah merupakan hak mutlak dari warga masyarakat akan tetapi merupakan hak yang menumpang dan berasal dari hak ulayat masyarakat. Hak milik hanya merupakan salah satu fungsi dari hak ulayat, fungsi mana berisikan upaya-upaya kepada para warga masyarakat agar dapat memanfaatkan tanah demi kelangsungan hidupnya. Maka di dalam hal ini fungsi tersebut jelas tidaklah berisikan kewenangan-kewenangan yang melebihi apa yang telah ditentukan oleh hak ulayat. Apabila kewenangan yang ada melebihi takaran yang telah ditentukan, maka akan timbul ketidakseimbangan pada fungsi-fungsi lainnya yang membahayakan hak ulayat.

Dari uraian di atas kiranya jelaslah bahwa hak-hak perseorangan di dalam hukum adat lahir dari konsepsi-konsepsi yang berpangkal tolak pada kehidupan kolektif, dimana yang diutamakan adalah penguasaan suatu wilayah oleh masyarakat dan atas dasar itulah diusahakan perlindungan atas para warganya serta peningkatan kesejahteraannya.

Dalam Undang-undang Pokok Agraria, hak ulayat diakui dengan beberapa persyaratan. Pelaksanaan hak ulayat tersebut haruslah sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, serta tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lain yang lebih tinggi (Pasal 3 Undang-undang Pokok Agraria). Jadi hak ulayat hanya diakui apabila masih ada menurut kenyataannya. Artinya dimana hak ulayat tidak ada lagi, maka hak tersebut tidak akan dilahirkan hak ulayat

yang baru. Bagaimana nasib hak tadi menurut hukum positif ? Pasal 2

Undang-undang Pokok Agraria menetapkan bahwa :

1. Atas dasar ketentuan pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai dimaksud dalam pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
2. Hak menguasai dari negara bermaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk :
  - a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
  - b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
  - c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
3. Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
4. Hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Dari uraian di atas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa dasar daripada hukum tanah yang kemudian berkembang menjadi Hukum Agraria dapat dikembalikan pada nilai-nilai sosial dan budaya tradisional yang dinamakan gotong-royong dimana dijaga pula hubungan baik dengan sesama manusia. Walaupun demikian, tampak bahwa nilai-nilai sosial dan budaya tersebut juga telah mengalami perubahan yaitu dengan pengakuan yang lebih tegas daripada kedudukan serta peranan individu, hal mana terutama disebabkan oleh karena bertambah banyaknya timbul kota-kota

sebagai pusat perdagangan dan bertambah luasnya jaringan komunikasi antar manusia.

## **2.5. Kedudukan Hak Ulayat setelah Berlakunya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat**

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, dipergunakan sebagai pedoman dalam daerah melaksanakan urusan pertanahan khususnya dalam hubungan dengan masalah hak ulayat masyarakat adat yang nyata-nyata masih ada di daerah yang bersangkutan. Peraturan ini memuat kebijaksanaan yang memperjelas prinsip pengakuan terhadap hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Kebijakan tersebut meliputi :

1. Penyamaan persepsi mengenai hak ulayat (pasal 1)
2. Kriteria dan penentuan masih adanya hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat (pasal 2 dan pasal 5)
3. Kewenangan masyarakat hukum adat terhadap tanah ulayatnya (pasal 2 dan pasal 4)

Maksud dikeluarkannya peraturan ini adalah menyediakan pedoman dalam pengaturan dan pengambilan kebijaksanaan operasional bidang pertanahan serta langkah-langkah penyelesaian masalah yang menyangkut tanah ulayat dalam kerangka pelaksanaan hukum tanah nasional. Pengaturan lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut di atas diwenangkan kepada daerah menurut perundang-undangan yang berlaku (pasal 6). Sesuai dengan maksud Undang-undang No 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan dengan demikian akan lebih mampu menyerap aspirasi masyarakat setempat.

### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

### **3.1. Metode Pendekatan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini menekankan pada eksistensi dan kedudukan hukum ulayat. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris berupa penelitian terhadap kenyataan-kenyataan, tingkah laku atau gejala sosial yang ada dalam masyarakat.

### **3.2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Rantepao Kabupaten Tana Toraja dengan fokus pejabat pemerintah Daerah, pegawai Kantor Pertanahan, Pegawai Kantor Kehutanan, Kepala Adat serta masyarakat hukum Adat. Selain itu pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa gejala seperti yang dikemukakan pada latar belakang merupakan realitas empiris di Kecamatan Rantepao, sehingga menjadi tanggung jawab moral bagi penelitian yang nota bene adalah warga Kecamatan Rantepao untuk memberikan sumbangsi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Tana Toraja dan Indonesia pada umumnya mengenai penyelesaian masalah diseputar hak ulayat masyarakat hukum adat.



### **3.3. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah Hukum Adat pertanahan di propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Tana Toraja, Kecamatan Rantepao mengenai tanah Tongkonan (Tanah Adat).

Dari segi tipenya, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan perkembangan atau frekuensi terjadinya suatu aspek fenomena hukum yang dimaksud secara terperinci.

### **3.4. Populasi dan Sampling**

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh Tanah Tongkonan (Tanah Adat) yang terletak di Kecamatan Rantepao Kabupaten Tana Toraja sedangkan teknik sampling yang digunakan adalah diambil dengan cara mengacak seluruh Kelurahan yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Rantepao dengan membagi tiga kategori kelurahan, yaitu kelurahan yang ramai, Kelurahan yang kurang ramai dan kelurahan yang tidak ramai. Setiap kategori diwakili oleh satu kelurahan dengan cara mengambil secara acak.

### **3.5. Jenis Pengumpulan Data**

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder adalah sejumlah data yang diperoleh melalui literatur/kajian kepustakaan yang bersifat actual dan ada relevansinya dengan bahan kajian berupa dokumen, buku, Undang-Undang, dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini seperti

Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1990 dan Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh di lapangan secara langsung sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan.

Jenis pengumpulan data pada penelitian ini ada tiga yaitu study dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview.

Untuk memperoleh data di lapangan maka digunakan teknik observasi dan wawancara/interview dengan tokoh-tokoh masyarakat, pemuka adat, dan instansi terkait lainnya seperti Pengadilan Negeri, Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Kehutanan. Adapun tempat yang dipilih dalam penelitian ini adalah kelurahan-kelurahan di Kecamatan Rantepao, Kabupaten Tanah Toraja, Propinsi Sulawesi Selatan.

### **3.6. Teknik Analisis Data**

Adapun teknik analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan tentang eksistensi, kedudukan hukum, serta keadaan hak ulayat dengan berbagi perangkat hukumnya, baik menurut pranata hukum adat maupun pranata hukum nasional (UUPA) serta aturan-aturan pelaksanaan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan tanah.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1. Letak, Luas dan Batas Kecamatan Rantepao**

Kecamatan Rantepao merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Tana Toraja yang letaknya 18 km dari kota Kabupaten Tana Toraja terdiri dari 15 kelurahan yaitu:

1. Kelurahan Singki
2. Kelurahan Karassik
3. Kelurahan Rantepao
4. Kelurahan Rante pasele
5. Kelurahan Penenian
6. Kelurahan Loang tanduk
7. Kelurahan Pasele
8. Kelurahan Malango
9. Kelurahan Tampo Tallung Lipu
10. Kelurahan Tagari Tallung Lipu
11. Kelurahan Tallung Lipu Matallo
12. Kelurahan Tallung Lipu
13. Kelurahan Mentiro Tiku
14. Kelurahan Buntu Barana
15. Kelurahan Tikala

Luas Kecamatan Rantepao yaitu 35.00 km<sup>2</sup> <sup>1)</sup>

#### 4.1.2. Penduduk

Adapun jumlah penduduk Kecamatan Rantepao berdasarkan data pada Kantor Statistik Kabupaten Tana Toraja hasil registrasi penduduk akhir tahun 2001 adalah sebanyak 39.719 orang dengan rincian 19.874 orang penduduk pria dan 19.845 orang penduduk wanita, yang semuanya adalah Warga Negara Indonesia asli. <sup>2)</sup>

#### 4.1.3. Keadaan Iklim dan Suhu

Kecamatan Rantepao termasuk daerah yang beriklim dingin karena pengaruh dari pegunungan dan bukit yang ada di sekelilingnya, dengan suhu udara berkisar antara 14-28<sup>0</sup>c.

Iklim di daerah ini pada umumnya sama dengan iklim yang ada di Indonesia, yang dipengaruhi oleh dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim hujan di daerah Tana Toraja mulai pada bulan Oktober sampai April, sedangkan musim Kemarau mulai sejak bulan Juni hingga September <sup>3)</sup>

---

<sup>1)</sup> Sumber data : Kantor Statistik Kabupaten Tana Toraja

<sup>2)</sup> Sumber data : Kantor Statistik Kabupaten Tana Toraja

<sup>3)</sup> Sumber data : Kantor Statistik Kabupaten Tana Toraja

#### 4.1.4. Keadaan Fisik Wilayah

Keadaan fisik Kecamatan Rantepao terdiri dari pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah serta perairan darat dan dalam hal ini letak geografis Kecamatan Rantepao terletak pada dataran tinggi, yaitu 700 Meter di atas permukaan laut.

Adapun keadaan air yang merupakan kebutuhan primer masyarakat adalah air yang bersumber dari mata air yang terdapat pada Tanah, Gunung dan Sungai yang dianggap memenuhi syarat untuk diminum dan untuk kebutuhan lain.<sup>4)</sup>

#### 4.1.5. Sumber Penghidupan

Pada umumnya sumber mata pencaharian orang Toraja ialah bercocok tanam, memelihara binatang ternak seperti ayam, itik, babi, kerbau, ikan mas dan mengusahakan kerajinan tangan seperti mengukir, menganyam, membuat sepatu, membuat kursi rotan dan menenun kain. Areal pertanian tidak begitu luas dibanding dengan jumlah penduduknya. Hasil pertanian yang berarti ialah padi, jagung, ubi-ubian, kacang-kacangan dan kentang serta sayur-sayuran.

Tanaman komoditi yang berarti ialah kopi, kentang, kacang ijo dan kedele, juga cengkeh.

---

<sup>4)</sup> Sumber data : Kantor Kecamatan Rantepao

#### **4.1.6. Lembaga Adat dan Struktur Organisasinya**

Seperti yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya bahwa hak ulayat mempunyai kekuatan hukum yang berlaku ke luar dan ke dalam, yang nyatanya berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Di kota-kota besar, keberadaan hak ulayat semakin lemah, bahkan dapat dikatakan hilang sama sekali/ tidak ada lagi. Dari sini, sebagian pihak memahami bahwa hak ulayat saat ini sudah tidak lagi merupakan hak yang hidup dalam masyarakat hukum adat, sehingga tidak lagi mempunyai arti penting, akan tetapi lain halnya dengan di Tana Toraja, khususnya di Kecamatan Rantepao, dimana hak ulayat masyarakat hukum adat masih terlihat keberadaannya.

Lembaga adat di Kecamatan Rantepao mempunyai fungsi yang sangat kuat. Status sosial masyarakat Rantepao populer dengan istilah TANA. Dengan urutan-urutan sebagai berikut:

##### **1. Tana' Bulaan ( Tokapua )**

Golongan ini terdiri dari kaum bangsawan, pemimpin adat, pemuka masyarakat. Banyak istilah dalam bahasa Toraja untuk menyebutkan golongan ini. Istilah itu seperti : Anak Patalo, Kayu Kalandona Tondok, Todi Bulle Ulunna dll. Semua istilah tidak lasim dipergunakan dalam bahasa sehari-hari tetapi dipakai dalam acara resmi atau pertemuan formil lainnya.

## **2. Tana' Bassi ( Tomakaka )**

Golongan menengah masyarakat Toraja disebut Tomakaka. Golongan ini erat hubungannya dengan golongan Tokapua. Mereka adalah golongan bebas, mereka juga memiliki tanah persawahan, namun tidak sebanyak yang dimiliki golongan bangsawan. Tomakaka yang tidak memiliki harta benda disebut Tomakaka Kandian.

## **3. Tana' Karurung**

Golongan Masyarakat biasa pada masyarakat Tana Toraja disebut Tana Karurung. Pada umumnya mereka tidak mempunyai tanah persawahan sendiri. Mereka adalah penggarap tanah bangsawan. Mereka adalah kaum tani dan pekerja yang ulet, tekun dan hidup sangat sederhana. Golongan ini berada diatas derajat tana' kua-kua.

## **4. Tana' Kua-Kua**

Golongan terbanyak yang menjadi tulang punggung masyarakat Toraja ialah Tobuda. Pada umumnya mereka tidak mempunyai tanah persawahan sendiri melainkan hanya sebagai petani penggarap tanah bangsawan. Mereka adalah kaum tani dan pekerja yang ulet, tekun dan hidup sangat sederhana. Golongan ini termasuk Kaunan atau golongan budak. Dahulu semua kaum bangsawan mempunyai lusinan budak. Golongan hamba ini adalah yang paling dipercaya atasannya karena nenek

mereka telah bersumpah setia turun temurun, akan tetapi atasannya juga mempunyai kewajiban membantu mereka dalam kesulitan hidupnya. Golongan ini tidak boleh kawin dengan kelas yang lebih tinggi seperti Tokapua dan Tomakaka.

Lembaga adat di bidang kepemimpinan adalah :

### **1. Ambe' Tondok**

Ambe' Tondok adalah Pemimpin Masyarakat Kolektif dalam sebuah desa. Tugasnya pluralistis, baik sebagai penguasa maupun sebagai hakim adat untuk menjaga kestabilan masyarakat desanya.

### **2. Topareng'**

Topareng' adalah penanggung jawab adat dan agama. Mereka menjadi pioner dalam memulai menanam bibit padi. Mereka tempat bertanya kalau ada rencana anggota Masyarakat hendak membuat pesta atau niat perkawinan dan selalu bersama Ambe' Tondok dalam menentukan sesuatu. Topareng' berpantang tidak boleh makan binatang mati atau bangkai. Topareng' berpantang dari makanan tertentu sejak padi mulai berbuah sampai selesai dipetik. Topareng' tidak boleh makan di pasar, tidak boleh makan daging hewan yang mati dan lain-lain. Pembahagian daging pada upacara adat selalu mendahulukan Topareng'. Topareng' adalah kedudukan turun temurun pada suatu keluarga karena fungsi ini diberikan kepada



keluarga yang pada waktu dahulu berjasa membela keamanan kampung.

### 3. Tobar

ialah pembantu Toparengé' dalam membina adat. Dalam tiap desa ada dua atau empat Tobar.

Tugas masing-masing bagian di atas dapat digambarkan sebagai berikut :

Toparengé' adalah pemangku/ketua adat tertinggi yang diangkat berdasarkan garis keturunan secara turun temurun melalui keputusan musyawarah diantara para tokoh masyarakat adat (melalui proses pemilihan). Jika Toparengé' mangkat/meninggal dunia, maka digantikan oleh anaknya dan jika anak Toparengé' tidak ada atau meninggal terlebih dahulu maka Toparengé' yang baru diangkat dari saudara laki-lakinya.<sup>5)</sup>

Untuk melaksanakan tugasnya Toparengé' dibantu oleh beberapa pemangku adat yang menempati bidang-bidang tertentu, yang juga diangkat melalui masyarakat bersama dengan pemilihan Toparengé'. Diantara pemangku adat dimaksud adalah Ambe' Tondok dan Tobar.

---

<sup>5)</sup> Nek Renge, Toparengé, Wawancara tanggal 26 April 2003

Dari struktur organisasi lembaga adat di atas memberi petunjuk bahwa tanah ulayat, demikian pula hak ulayat masih terdapat di daerah ini.<sup>6)</sup>

#### **4.2. Keberadaan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Tana Toraja di Kecamatan Rantepao Kabupaten Tana Toraja**

Berdasarkan literatur hukum adat, hak atas penguasaan atas tanah yang tertinggi adalah hak ulayat yang mengandung dua unsur yakni unsur hukum privat dan hukum publik. Di bawah hak ulayat adalah hak ketua adat dan kepala-kepala adat sebagai petugas masyarakat hukum adat yang mempunyai wewenang untuk mengolah, mengatur dan memimpin penguasaan pemeliharaan, peruntukan dan penggunaan tanah ulayat tersebut. Inilah yang dimaksud dengan unsur yang beraspek hukum publik. Yang beraspek hukum privat adalah hak-hak atas tanah yang dikuasai oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, yang semuanya secara langsung ataupun tidak langsung bersumber pada tanah ulayat, sebagai hak ulayat.

Istilah sinonim yang digunakan untuk hak ulayat atau *beschikkingsrecht*, adalah berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Istilah-istilah tersebut kemudian dikonstankan oleh UUPA dengan memakai istilah hak ulayat untuk seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk masyarakat hukum adat Toraja, sehingga

---

<sup>6)</sup> Amping, Toparenge, Wawancara Tanggal 9 Oktober 2002

saat ini hak atas tanah dari masing-masing persekutuan hukum lebih dikenal dengan hak ulayat.

Hak ulayat adalah kewenangan untuk mengatur, bertindak / berbuat dan atau melaksanakan terhadap suatu daerah, kawasan atau lingkungan dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan tanah ulayat bagi hidup dan kehidupan masyarakat hukum adat. Jadi hak ulayat adalah suatu hak yang melekat pada lembaga masyarakat hukum adat untuk mengatur penggunaan dan peruntukan tanah ulayat sebagai hak/milik bersama, demi kesejahteraan anggota masyarakat hukum adat itu sendiri.

Mengenai proses terjadinya hak ulayat tersebut adalah bersamaan dengan terbentuknya suatu persekutuan hukum adat Toraja yang pada mulanya hanya dimanfaatkan ditanami dengan tanaman-tanaman jangka pendek seperti Talas, Ubi Jalar, Singkong, Bambu, Kayu Kasuari/Buagin.<sup>7)</sup>

Masyarakat hukum adat setempat secara berkelompok membuka tanah dengan menanam tanaman jangka pendek sehingga menimbulkan hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan tanah ulayat yang disebut dengan hak ulayat yang terjadi secara turun temurun beralih kepada keluarga anggota masyarakat hukum adat berlangsung sampai saat sekarang (masyarakat hukum adat geneologis).<sup>8)</sup>

---

<sup>7)</sup> Lusiana, SH, Wawancara tanggal 12 Desember 2002

<sup>8)</sup> Natalia Mangoting, SE, wawancara tanggal 17 Desember 2002

<sup>9)</sup> Calvin Kadenganan, SH.M.Hum, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tana Toraja, Wawancara Tanggal, 10 Maret 2003.

“Arti dari pada Tongkonan adalah : Kelompok/satu kesatuan masyarakat yang keberadaan diakui oleh masyarakat Tana Toraja secara turun-temurun yang mempunyai / dapat memiliki masyarakat antara lain :

1. Tanah kering/sawah
2. Rumah tempat pemilik Tongkonan
3. Tanah pengembalaan
4. Kuburan

Mengenai kepemilikan tersebut diatas adalah secara tidak tertulis. Pada umumnya kepemilikan tanah di Kabupaten Tana Toraja hampir 90% secara Tongkonan. Selanjutnya khusus Kecamatan Rantepao kepemilikan tanah 95% secara Tongkonan. Adapun mengenai proses Pensertipikatan tanah yang kami lakukan tahun 2001 ke bawah adalah 96% diproses pemberian dan Tahun 2002 ke atas diproses Pengakuan.”<sup>10)</sup>

Berbeda dengan hasil wawancara pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tana Toraja, Kantor Kehutanan Kabupaten Tana Toraja menyatakan sebaliknya mengenai keberadaan Tanah Ulayat di hutan-hutan yang terdapat di Kecamatan Rantepao. “Sebenarnya tidak ada hutan yang dikelola oleh Masyarakat Adat, cuma karena lokasi hutan dekat dengan Tanah ulayat mereka, maka mereka menganggap bahwa hutan tersebut termasuk milik mereka (tanah ulayat / tongkonan).”<sup>11)</sup>

---

<sup>10)</sup> Allo, Bsc. Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kabupaten Tana Toraja, Wawancara Tanggal 10 Maret 2003

<sup>11)</sup> Ir. Hardi Paridi, Pegawai Kantor Kehutanan Kabupaten Tana Toraja.

Hal ini disebabkan batas-batas hak ulayat yang tidak jelas. Suatu persekutuan hukum terdiri atas himpunan umat manusia yang teratur secara terstruktur dan mempunyai pimpinan serta wilayah tertentu dan adanya hubungan hidup yang erat antara manusia atau masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan tanah sebagai lingkungan wilayahnya. Lingkungan atau wilayah masing-masing persekutuan hukum secara tradisional dikenal dengan tanda-tanda alam berupa gunung batu, sungai, dan pohon-pohon besar atau tanaman-tanaman tertentu yang disepakati oleh masyarakat hukum adat yang berbatasan sebagai batasnya.

Kondisi seperti di atas menyulitkan untuk menentukan secara tegas dan pasti sampai di mana batas wilayah suatu persekutuan hukum yang merupakan hak ulayat mereka.

Batas tanah, dan teritorial merupakan suatu persoalan mendasar dan prinsipil yang apabila tidak dipahami dan diatur secara juridis akan menimbulkan sengketa.

Lingkungan suatu perlindungan hukum adat secara tradisional ditentukan oleh tanda-tanda alam berupa gunung, batu, sungai, pohon besar dan sebagainya sesuai kesepakatan antara masyarakat-masyarakat yang berbatasan satu sama lain.

Secara garis besarnya dapat dikatakan bahwa hak-hak atas tanah dan air yang sudah ada, setiap desa atau kampung mempunyai wilayah dengan batas-batas jelas sebagai tempat untuk mencari dan memperoleh nafkah bagi warga masyarakat guna kebutuhan hidup mereka.

Maksud dari batas-batas yang jelas tidak lain adalah tanda-tanda alam seperti yang telah disebutkan di muka. Dengan demikian, maka sesungguhnya batas-batas itupun belum benar-benar tegas dan pasti. "Batas-batas dari hak ulayat masyarakat hukum adat Kecamatan Rantepao (Tator) itu tidak jelas, karena hanya ditandai dengan batas-batas alam seperti batu besar, pohon, sungai, lereng gunung dan lain-lain."<sup>12)</sup>

Hak ulayat masyarakat hukum adat Kecamatan Rantepao (Tator) ditandai dengan batas-batas alam. Ketentuan seperti itu akan memunculkan persoalan baru mengenai batas hak ulayat sebab tidak dapat dipungkiri bahwa batas alam seperti itu pada suatu saat akan berpindah dan hilang walaupun disebutkan oleh beberapa responden bahwa batas-batas tersebut tidak jelas, namun dalam kenyataannya bagi masyarakat yang bersangkutan hal ini tetap dipegang teguh sebagai tanda batas untuk membedakannya dengan batas hak ulayat masyarakat hukum adat sekitarnya.

Menurut kepustakaan hukum adat, bahwa terjadinya hak milik secara perseorangan adalah jika diawali dengan kegiatan membuka tanah terlebih dahulu kemudian ditanami dengan tanaman semusim atau tanaman jangka pendek dan dilanjutkan dengan tanaman keras kemudian diolah dan dipelihara secara terus-menerus, sehingga hubungan antara tanah dengan orang yang mengelolah dan mengerjakannya telah menjadi kuat atau erat, kemudian tanah itu lalu menjadi hak milik secara perseorangan yang bersifat pribadi.

---

<sup>12)</sup> Nek Renge, Wawancara tanggal 15 Februari 2003

Masih kuatnya hak milik adat atas tanah yakni hak ulayat, terbukti dari masih ada dan berfungsinya struktur lembaga masyarakat hukum adat seperti diuraikan terdahulu. Struktur lembaga kemasyarakatan hukum adat lazim dikenal dengan sistem pemerintahan adat tersebut, masih tetap berfungsi baik menjalankan tugas dan tanggung jawabnya maupun dalam menjalankan hak dan kewajibannya.

Adapun jabatan pemangku adat, tidak diangkat melalui suatu proses pemilihan, tetapi berdasarkan garis keturunan secara turun temurun, yakni jika seorang pemangku adat meninggal Dunia, maka yang menggantikannya adalah anak laki-lakinya. Namun jika tidak mempunyai anak laki-laki, maka yang menggantikannya adalah saudaranya laki-laki atau keturunan yang berdarah biru lainnya meskipun untuk yang terakhir ini ditetapkan dengan penetapan keputusan adat.

#### **4.3. Sistem Penguasaan Tanah / Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Tana Toraja di Kecamatan Rantepao Kabupaten Tana Toraja**

Masyarakat Hukum Adat Tana Toraja adalah Masyarakat hukum adat genealogis, disebabkan para warganya terikat oleh pertalian darah, demikian pula halnya di kecamatan Rantepao.

Tanah ulayat dikelola oleh masyarakat hukum adat itu sendiri, serta masyarakat luar (bukan dari anggota masyarakat adat bersangkutan) setelah mendapatkan izin dari pemilik tanah.

Menurut hukum adat, tanah ulayat tidak bisa diwariskan ataupun diperjual belikan kepada orang di luar masyarakat hukum adat itu sendiri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masyarakat Tana Toraja, Tana Adat terbagi atas 2 yaitu tanah sawah dan tanah kering. Tanah kering tidak bisa dijual belikan, dan hanya bisa dipinjamkan pada orang lain setelah mendapat izin dari pemilik tanah dengan syarat bila keturunan pemilik tanah membutuhkan, maka peminjam wajib segera mengembalikan tanah yang telah dipinjamnya. Pada tanah sawah, pemilik tanah bisa mengalihkan haknya pada siapa saja dengan jalan menjual tanah tersebut.

Proses terjadinya kepemilikan sawah adalah sebagai berikut :

Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia maka adalah kewajiban bagi anak-anaknya untuk mengadakan pesta kematian bagi orang tuanya. Pada pesta adat tersebut ada tiga jenis hewan yang akan dikorbankan untuk menemani arwah ke Puya.

Penganut kepercayaan Aluk Todolo percaya bahwa semua arwah orang yang sudah meninggal dunia menuju kesatu tempat peristirahatan yang bernama P U Y A.

Apabila seseorang meninggal dunia jiwanya keluar dari jasad tubuhnya dan bersiap memasuki phase kehidupan baru di alam Puya, akan tetapi bila sang jiwa ini menghadap penguasa Puya, ia akan ditanya sudah berapa jauh upacara pemakamannya dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tingkat kemungkinan upacara yang tersedia. Kalau ternyata belum selesai dilaksanakan upacaranya dengan baik maka arwah itu tidak dibolehkan masuk Puya dan harus kembali kedunia semula. Makluk halus



yang sering mengganggu manusia sesuai dengan kepercayaan Aluk Todolo, adalah jiwa orang mati yang belum diperkenankan masuk Puya.

Oleh karena itu semua orang Toraja yang meninggal dunia harus diselesaikan aluknya/upacara pemakamannya agar jiwanya tidak sengsara mengembara mengganggu masyarakat. Seseorang Toraja yang meninggal ditempat jauh harus dibawa pulang ke rumahnya untuk diselesaikan upacara pemakamannya. Kalau yang meninggal tidak diketahui lagi dimana rimbanya, diadakan suatu upacara formalitas dengan memasukkan angin kedalam kain sarung (di poyan angin) dan dikuburkan di liang keluarga. Kalau seseorang mati karena kecelakaan, bagian-bagian tubuh dikumpulkan karena tubuh yang tidak lengkap dan diupacarakan jiwanya juga tidak lengkap masuk Puya.

Kehidupan jiwa di Puya adalah sama dengan kehidupan kita di dunia ini karena itu untuk hidup bahagia di Puya kehidupan didunia ini juga harus bahagia, berbuat baik terhadap sesama manusia dan memenuhi segala kewajiban dan tanggung jawab dalam masyarakat sesuai aturan Aluk Todolo. Kehidupan di dunia adalah cermin kehidupan terhadap arwah itu semakin banyak hewan yang dipotong dan semakin ramai upacara pemakaman semakin baik hidup seorang di Puya. Karena itulah hidup orang Toraja diarahkan pada saat meninggal dunia baru nampak kekayaannya. Tiga jenis hewan yang akan menemani ke Puya adalah Babi hutan dengan harga berkisar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) hingga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Kerbau hitam dengan harga berkisar Rp. 8.000.000,-

(delapan juta rupiah) hingga Rp. 15.000.000,- (limabelas juta rupiah) dan Kerbau Belang atau lebih dikenal dengan sebutan Tedong Bonga yang harganya berkisar antara Rp. 30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah) hingga Rp. 150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiah).

Sumbangan anak pada pesta kematian tersebut akan diperhitungkan dalam pembagian harta warisan kedua orang tuanya. Semakin besar sumbangan anak pada pesta kematian, maka makin besar pula hak bagiannya dalam pembagian warisan.

Tanah warisan yang dapat dibagi hanyalah berupa tanah sawah, sedangkan tanah kering menjadi harta pusaka keluarga yang tidak dapat dibagi melainkan hanya dapat dinikmati dan diambil manfaatnya secara bersama-sama.

Harta pusaka keluarga yang berupa tanah kering dimiliki oleh keturunan dari pemilikan Tana Tongkonan. Harta pusaka keluarga umumnya di banguni Rumah Adat (Rumah Tongkonan), Lumbung Padi, Rumah tinggal keturunan dari pemilik tanah tongkonan yang diperkenankan oleh keluarga besar untuk berdiam di areal Tanah tersebut. Juga dibangun patane yaitu kuburan keluarga yang terbuat dari kayu berbentuk rumah tinggal dengan terjadinya perkembangan jaman patane yang sekarang banyak terbuat dengan model rumah tembok yang kecil. Namun umumnya tidak banyak Tana Tongkonan yang arealnya juga dibangun patane. Sebab pada umumnya tempat pekuburan orang Toraja adalah dilereng-lereng bukit

Toraja adalah dilereng-lereng bukit yang tinggi dan terjal yang sulit dijangkau oleh tangan manusia kecuali dengan memakai tangga disebut liang.

Tanah Tongkonan penguasaannya dilakukan oleh keturunan yang bermukim di lokasi Tanah tersebut. Setiap keturunan dari pemilik Tanah Tongkonan berhak untuk tinggal dan membangun di atas Tanah Tongkonan dengan syarat sepanjang mereka ikut berpartisipasi memelihara dan menjaga harta pusaka keluarga tersebut. Dalam artian apabila Rumah Adat (Rumah Tongkonan) berdasarkan musyawara keluarga ingin diperbaharui atau diperbaiki maka seluruh biaya membangun rumah itu dipikul oleh seluruh keturunan pemilik tanah tongkonan. Boleh tidaknya seorang keturunan mendiami dan membangun diatas Tanah tersebut ditentukan dalam rapat keluarga. Apabila seorang keturunan tidak lagi ikut memberi sumbangan bila ada perbaikan-perbaikan Rumah Adat dalam areal Tanah Tongkonan tersebut maka biasanya rapat keluarga akan memutuskan tidak menerima keturunan tersebut menetap di areal Tanah Tongkonan maupun mengambil manfaat diatas Tanah Tongkonan tersebut.

#### **4.4. Pelaksanaan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Tana Toraja di Kecamatan Rantepao Kabupaten Tana Toraja Setelah Berlakunya Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat**

Undang-Undang pokok Agraria nomor 5 Tahun 1960 dalam pelaksanaannya banyak diikuti dengan peraturan pelaksanaannya salah

satunya adalah peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian masalah Hak ulayat masyarakat hukum adat.

Hasil penelitian di Kecamatan Rantepao Kabupaten Tana Toraja menyatakan bahwa hak ulayat semakin lemah sebab pemerintah Daerah bersama-sama para pakar hukum Adat, masyarakat Hukum Adat dan Lembaga Swadaya masyarakat serta instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam, yang ditunjuk untuk melakukan penelitian dan penentuan apakah masih ada hak ulayat dengan syarat :

- a. terdapat sekelompok orang yang merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari.
- b. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan
- c. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan, dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Ternyata tidak melakukan penelitian tersebut, disebabkan tidak diketahuinya batas-batas yang jelas antara tanah ulayat satu dengan lainnya sehingga cukup membingungkan bagi pemerintah daerah. Hal lain yang menyebabkan pemerintah daerah kurang menanggapi tanah ulayat adalah karena masyarakat

Tanah Toraja sendiri belum ada yang mengangkat permasalahan tanah tongkonan dalam suatu seminar yang hasilnya akan diajukan ke DPRD untuk dikeluarkan PERDA.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Keberadaan Tanah ulayat pada masyarakat hukum Adat Tana Toraja di Kecamatan Rantepao Kabupaten Tana Toraja masih ada namun tidak sekuat dahulu kala disebabkan perkembangan jaman. Dan faktor ekonomis menjadi pemicu beralihnya tanah ulayat kepada orang lain.
2. Sistem penguasaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Tana Toraja di Kecamatan Rantepao Kabupaten Tana Toraja tergantung pada jenis tanahnya. Untuk tanah sawah maka penguasaannya dilakukan oleh masing-masing pemilik tanah, sedangkan untuk tanah kering dikuasai oleh keturunan yang bermukim di areal tanah ulayat dengan memperhatikan Rapat keluarga besar dari segenap keturunan pemilik tanah ulayat.
3. Pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum Adat Tana Toraja di Kecamatan Rantepao, Kabupaten Tana Toraja setelah berlakunya peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman penyelesaian masalah hak ulayat Masyarakat Hukum Adat tidak mengalami perbaikan, bahkan cenderung pudar sebab Pemerintah daerah Tana Toraja tidak menindak lanjuti

Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 dengan alasan terhadap Tanah Tongkonan belum dilakukan pencatatan, selain itu apabila pemerintah Daerah mengeluarkan peraturan Daerah, maka masalah tersebut harus diangkat dalam suatu seminar sementara hal itu belum dilakukan.

## 5.2.Saran

Berangkat dari kesimpulan tersebut diatas, maka untuk mengatasi persoalan-persoalan yang muncul sekaitan dengan hak ulayat, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya persamaan persepsi antara pemerintah dengan masyarakat hukum Adat mengenai eksistensi dan kedudukan hukum hak ulayat dengan jalan peningkatan penyuluhan hukum di bidang pertanahan, terutama yang berkaitan dengan Tanah Ulayat.
2. Untuk memperoleh data mengenai luas dan batas-batas Tanah ulayat, ada baiknya bila pemerintah daerah melakukan penelitian dengan melibatkan lembaga terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat serta Tokoh masyarakat hukum adat setempat.
3. Ada baiknya apabila pemerintah daerah dalam waktu dekat mengangkat masalah Tanah Ulayat (Tanah Tongkonan) dalam suatu seminar dan ditindak lanjuti dengan keluarnya peraturan daerah mengenai Tanah Tongkonan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia*, Alumni Bandung, 1979
- Ashshota, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998
- Ali. A, *Mengembara Di Belantara Hukum*, UNHAS, Ujung Pandang, 1990
- Gautama, Sudargo. *Tafsiran Undang-undang Pokok Agraria dan Peraturan-peraturan Pelaksanaannya*, Citra Aditya Bakti Bandung, 1997
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan Jakarta, 1999
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, Djambatan Jakarta, 2000
- Halim, A Ridwan. *Hukum Agraria dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia Jakarta, 1988
- Husaini, N. *Metodologi Penelitian, Bumi Aksara*, Jakarta 1995
- Koesnoe, Moh. *Hukum Adat Sebagai Model Hukum*, Mandar Maju Bandung, 1992
- Kumpul, Prayitno. *Prinsip Dasar Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Makasar, Makasar 1995
- Kartasapoetra, G. Kartasapoetra, R.G. Kartasapoetra, A.G. Setiadi A. *Hukum Tanah, Jaminan Undang-undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, PT. Bina Aksara Jakarta, 1985
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, PT. Bumi Aksara Jakarta, 1999
- Marampa', A.T, *Guide To Tana Toraja*, t.t.
- Marampa', A.T, *Mengenal Toraja*, t.t.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung 1995
- Muhammad, Bushar. *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita Jakarta, 2000



- Parlindungan, AP. *Komentar Atas Undang-undang Pokok Agraria*, Alumni Bandung, 1982
- Parlindungan, AP. *Kapita Selekta Hukum Agraria*, Alumni Bandung, 1981
- Peranginangin, Effendi. *Intisari Hukum Agraria*, Esa Studi Club, 1979
- Sugangga, I.G.N. *Hukum Adat Khusus, Hukum Adat Waris pada Masyarakat Hukum Adat yang Bersistem Patrilineal di Indonesia*, Semarang 1988
- Soekamto, Soerjono. Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 1995
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Swarsono, Sri-Edi, *Pedoman Menulis Daftar Pustaka, Catatan Kaki untuk Karya dan terbitan Ilmiah*, UI-Press, Jakarta, 1990.
- Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, 1979